

TANTANGAN PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK KOTA SEMARANG¹

Oleh: Dr. H. Musahadi, M.Ag.

(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Walisongo)

Pendahuluan

Adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir memenuhi undangan untuk menyampaikan *keynote speech* pada Konferensi Kewirausahaan dan Pendidikan yang sangat penting ini. Konferensi ini sangat istimewa, karena diinisiasi dan diselenggarakan dalam kerangka 10 Tahun Proyek Pendidikan Colruyt Group Belgia di Semarang, sebagai bagian dari tanggung jawab social perusahaan untuk berkontribusi pada kemaslahatan umat manusia, terutama melalui beasiswa pendidikan. Sesuatu yang tampaknya masih belum sepenuhnya menjadi kesadaran substantive bagi dunia usaha dan dunia industry di Indonesia. Memang telah ada gerakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di negeri ini, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Itulah sebabnya, kita perlu memberikan penghargaan pada siapa saja yang mengkhidmahkan diri dalam upaya strategis ini.

Pendidikan memang menjadi pilihan paling strategis untuk pembangunan sumberdaya manusia. Melalui pendidikan, berbagai dimensi masalah sosial bisa diurai dan dicarikan solusinya. Banyak orang meyakini, masalah kemiskinan, pengangguran, kesehatan, kerusakan lingkungan, intoleransi, radikalisme bahkan terorisme berkelit berkelindan dengan masalah pendidikan. Titik paling strategis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah melalui pendidikan.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Definisi ini secara komprehensif memuat idealitas, filosofi, visi, tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dari usaha besar yang bernama pendidikan, sekaligus profil mengenai manusia Indonesia yang dicitakan, meskipun untuk mewujudkannya masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan.

¹ Disampaikan pada “Konferensi Kewirausahaan dan Pendidikan: 10 Tahun Proyek Colruyt Grup di Semarang, Hotel Novotel Semarang, 15 Agustus 2015.

Deretan masalah pendidikan masih sangat panjang. Jika kita mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau 8 poin yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia, maka secara jujur harus diakui masih banyak hal yang mendesak untuk diperbaiki. Masih banyak penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang belum memenuhi 8 standar tersebut, yakni (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi ; (3) standar proses; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

Terkait standar kompetensi lulusan, kritik yang cukup lama dialamatkan kepada dunia pendidikan di negeri ini adalah, lulusan terlalu *heavy* diarahkan untuk mengejar kompetensi kognitif tetapi jauh dari sikap kemandirian dan produktivitas. Wajarlah jika, pada kenyataannya, tingkat pendidikan tidak selalu paralel dengan tingkat kemandirian dan produktivitas. Pendidikan formal yang selama ini diterapkan di Indonesia telah membuang waktu hidup yang begitu lama. Untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dibutuhkan waktu 12 tahun (6 tahun SD + 3 tahun SMP + 3 tahun SMA). Jika ditambah kuliah di level pendidikan tinggi (sarjana) maka setidaknya harus ditambah lagi 4 tahun.

Apabila pendidikan tidak diorientasikan pada kompetensi sikap kemandirian dan produktivitas, maka ada 16 tahun dari waktu hidup rata-rata orang Indonesia menjadi waktu yang kurang produktif. Jika umur 7 tahun orang Indonesia memasuki pendidikan formal, berarti produktivitas normal baru dimulai setelah mencapai usia 23 tahun (7 + 16). Jika rata-rata mereka baru bisa bekerja setelah 2 tahun (waktu tunggu), maka bisa disimpulkan bahwa usia produktif baru dimulai setelah berumur 25 tahun.

Situasi ini diperburuk dengan lemahnya sikap kemandirian. Produk sistem pendidikan di negeri ini lebih banyak yang berorientasi menjadi abdi negara (PNS), buruh, pekerja atau pegawai pada perusahaan-perusahaan swasta dan tidak banyak yang mengembangkan kewirausahaan. Lebih banyak yang mencari pekerjaan dibanding yang menciptakan lapangan pekerjaan. Seharusnya, rata-rata lama bersekolah linear dengan pendapatan, tetapi di Indonesia tidak demikian. Persoalan ini mesti serius diatasi, salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, termasuk di kampus-kampus, supaya para sarjana tidak berpikir hanya berburu pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang berusaha. Hal ini penting mengingat pengalaman berbagai negara menunjukkan fenomena hubungan korelatif secara positif antara jumlah pengusaha dengan tingkat kemajuan dan kemakmuran sebuah negara, Itulah sebabnya, memperbincangkan tantangan

pendidikan dan mengkaitkannya dengan kewirausahaan menjadi sangat penting dan niscaya.

Tentang Kewirausahaan

Suharto Wirakusumo sebagaimana dikutip oleh Iis Prasetyo (2009) menyebutkan bahwa istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan “*Entrepreneurship*”, yang dapat diartikan sebagai “*the backbone of economy*”, atau dapat disebut sebagai tulang belakang perekonomian atau pengendali perekonomian suatu bangsa. Dari sini maka dapat dipahami bahwa profil perekonomian suatu bangsa sangat ditentukan oleh profil kewirausahaannya. Oleh sementara kalangan, *Entrepreneurship* juga dipahami sebagai jiwa kewirausahaan yang dibangun dengan tujuan untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan pasar. *Entrepreneurship* meliputi pembangunan/ pembentukan sebuah perusahaan baru, kegiatan kewirausahaan juga merupakan kemampuan managerial yang diperlukan oleh seorang entrepreneur.

Secara epistemologi, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Menurut Thomas W Zimmerer sebagaimana dikutip Iis Prasetyo (2009), kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi sehari-hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Intinya, kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup.

Pada awalnya, kewirausahaan dipahami sebagai bakat bawaan sejak lahir, bahwa *entrepreneurship are born not made*, sehingga kewirausahaan dipandang bukan hal yang penting untuk dipelajari dan diajarkan. Namun sejalan dengan perubahan waktu makin disadari bahwa kewirausahaan ternyata bukan hanya bakat bawaan sejak lahir, atau bersifat praktek lapangan saja. Kewirausahaan bahkan kemudian berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang perlu dipelajari. Kemampuan seseorang dalam berwirausaha, dapat dimatangkan melalui proses pendidikan. Seseorang yang menjadi wirausahawan adalah mereka yang mengenal potensi dirinya dan belajar mengembangkan potensinya untuk menangkap peluang serta mengorganisir usahanya dalam mewujudkan cita-citanya.

Pada perkembangan berikutnya, sejalan dengan tuntutan perubahan yang cepat pada paradigma pertumbuhan yang wajar dan perubahan ke arah globalisasi yang menuntut adanya keunggulan, pemerataan, dan persaingan, maka dewasa ini terjadi perubahan paradigma pendidikan, yakni Pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen. Terdapat beberapa faktor yang mendorong bagi hadirnya hal tersebut:: Pertama, kewirausahaan memiliki “*body of knowledge*” yang utuh dan nyata (*distinctive*), berisi teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi “*venture start up*” dan “*venture growth*”. Hal ini jelas tidak masuk dalam “*frame work general management courses*” yang memisahkan antara “*management*” dengan “*business ownership*”. Ketiga, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, Keempat, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur (Prasetyo:2009).

Persis seperti ilmu manajemen yang pada awalnya berkembang pada lapangan industri, kemudian berkembang dan diterapkan di berbagai lapangan lainnya, maka seperti itulah disiplin ilmu kewirausahaan dalam perkembangannya. Ia mengalami evolusi yang pesat, yaitu berkembang bukan pada dunia usaha semata, tetapi juga pada berbagai bidang, seperti bidang industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan institusi-institusi lainnya. Melalui spirit kewirausahaan, maka birokrasi dan institusi akan memiliki motivasi, optimisme dan berlomba untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel, dan adaptif (Prasetyo: 2009).

Tentu masing-masing daerah memiliki spectrum keterlibatan yang berbeda-beda mengenai isu kewirausahaan ini. Sejauhmana spirit kewirausahaan memasuki cara berpikir, bertindak dan cara membuat prioritas akan menentukan masa depan kemandirian ekonomi daerah tersebut. Termasuk bagaimana dunia pendidikan di suatu daerah terlibat dan meresponi isu kewirausahaan ini berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Pencermatan mengenai hal ini akan sangat membantu dalam membuat kerangka kerja mengenai pengembangan spirit kewirausahaan di sebuah daerah, sekaligus membangun sinergi antar elemen masyarakat untuk upaya tersebut.

Tantangan untuk Kota Semarang

Dalam kebijakan pembangunan lima tahunan, Pemerintah Kota Semarang menempatkan prioritas pembangunan daerah pada penyelenggaraan pemerintahan yang

amanah (*good governance*) untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan potensi daerah guna mewujudkan kesetaraan dengan kota metropolitan lainnya, terutama kota industri, perdagangan dan jasa. Dalam kerangka ini, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen melaksanakan amanat Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*), Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*), Meningkatkan Wajib Belajar 9 Tahun, dan mulai tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun (Wajar 12 Tahun) atau Program Pendidikan Menengah Universal.

Program ini terutama dijustifikasi oleh hal-hal sebagai berikut: Pertama, menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kedua, kelompok usia lulus SLTP/ sederajat masih belum layak bekerja (usia 15 tahun). Apabila tidak melanjutkan studi akan berdampak sosial yang kurang baik di masa mendatang. Ketiga, pendidikan menengah memiliki kontribusi positif bagi peningkatan kehidupan sosial dan politik. Keempat, untuk menjawab tantangan persainangn global yang menempatkan semakin pentingnya sumberdaya manusia yang berkualitas. Kelima, Wajib Belajar 12 Tahun memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

Lebih dari itu, Program tersebut juga memiliki keterkaitan dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang, mengingat salah satu indikator dalam pengukuran IPM adalah pendidikan. Meskipun data statistik menunjukkan bahwa IPM Kota Semarang berada jauh di atas rata-rata IPM Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, namun jika pembangunan pendidikan tidak diberi perhatian secara khusus dan tepat sasaran, bukan hal yang mustahil IPM Kota Semarang akan didahului oleh Kabupaten atau Kota lain.

Tabel 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang

No	Kategori	Semarang	Jawa Tengah
1	Usia Harapan Hidup (th)	72.24	71.71
2	Angka melek huruf (%)	96.98	90.45
3	Lama Sekolah (th)	10.30	7.39
4	Daya beli (ribu Rp)	652.80	643.53
IPM		77.98	73.6

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, Series 2014

Secara umum permasalahan pendidikan di Kota Semarang masih berfokus pada beberapa hal sebagai berikut: Pertama masalah sumber daya manusia. Menurut catatan Taufik Hidayat, Kabid Monbang Dinas Pendidikan Kota Semarang, ketersediaan guru SMP/MTs, SMA/MA dan SMK menurut data Dinas Pendidikan Kota dinilai sudah cukup, namun guru pada jenjang SD dan PAUD masih kurang jumlahnya. Mereka sebagian besarnya sudah menempuh pendidikan sarjana dan separohnya telah berstatus sebagai PNS. Namun kompetensi mereka masih rendah. Hal ini dilihat dari hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) yang telah dilakukan dalam kerangka sertifikasi guru. Hasilnya rata-rata masih rendah. Ketersediaan guru bidang ekonomi, IPS, bhs Inggris, kimia dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan, namun guru sejarah, guru kelas SD/MI, bahasa Jawa, seni budaya dan guru PAI masih kurang dari kebutuhan.

Kedua, masalah Sarpras. Permasalahan utama bidang sarana adalah pada bangunan sekolah, terutama untuk bangunan sekolah SD, sementara untuk gedung-gedung SMP, SMA/SMK jauh lebih baik. Sedangkan prasarana seperti laboratorium dan perpustakaan, pada umumnya masih sangat terbatas, dan ketiga masalah Kurikulum. Pemberlakuan Kurikulum 2013 (K13) masih dinilai bermasalah di kota Semarang. Pemberlakuan K13 hanya di 12 SD, 7 SMA, SMP ex RSBI dan jenjang SMK semuanya, namun perangkatnya dinilai belum siap.

Untuk pendidikan madrasah di bawah Kementerian Agama (MI, MTs, MA), problem mereka jauh lebih kompleks, baik menyangkut SDM (seperti keterbatasan guru, problem *miss-matching* dan tidak meratanya program pembinaan karir guru), masalah sarpras (seperti gedung, laboratorium dan perpustakaan), maupun input siswa yang pada umumnya madrasah masih menjadi *second destination*, meskipun terdapat pula madrasah yang kualitasnya melebihi sekolah.

Pada Sekolah Kejuruan (SMK) tantangannya berbeda. Tugas utama SMK adalah mengantarkan anak didik untuk bisa bekerja setelah lulus sekolah (lulusannya terserap di dunia kerja) atau menjadi wirausahawan. Itulah sebabnya, kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Perimbangan materi pembelajaran untuk SMK adalah 40 % teori dan 60 % dari pengalaman praktik. Agar terserap pada dunia kerja, SMK membutuhkan jalinan kerjasama dengan dunia kerja dan dunia industri. Untuk memenuhi kebutuhan Prakeri/Praktik Kerja Industri, mereka membutuhkan institusi industri.

Selama ini yang jadi persoalan adalah institusi industri yang menjadi mitra SMK banyak yang asal-asalan, karena jumlah industri yang “membuka diri” untuk menjadi partner SMK belum sebanding dengan kebutuhan SMK. Institusi industri yang *bonafide* pada umumnya mematok standar/kualifikasi sangat tinggi untuk bisa digandeng oleh SMK. Tak pelak, hanya SMK-SMK tertentu yang bisa memiliki akses ke mereka. Bidang-bidang sangat diminati adalah: teknik industri, TIK, teknologi pemasaran, dan garmen. Namun bidang-bidang seperti akuntansi atau kelompok-kelompok yang dulunya SMEA kurang begitu diminati.

Pada tahun 2008 Provinsi Jawa Tengah mendeklarasikan diri sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan diri sebagai Provinsi Vokasi, Gayung bersambut. Pada bulan September 2012, Plt. Walikota Semarang telah mencanangkan Semarang sebagai Kota Vokasi. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mematangkan diri sebagai kota yang berfokus pada pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi secara luas, dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memasuki pasar kerja sebagai tenaga terampil (juru teknik).

Pencanangan ini memiliki tujuan berganda (*multiplier effect*). Melalui pencanangan sebagai Kota Vokasi tersebut Pemerintah Kota Semarang sekaligus berharap bisa mengatasi masalah pengangguran, peningkatan keterampilan tenaga kerja yang memasuki pasar kerja serta penanggulangan kemiskinan pada kelompok masyarakat usia produktif. Kebijakan pengembangan pendidikan SMK merupakan salah satu dari program prioritas pembangunan daerah yaitu Sapta Program sebagaimana diamanatkan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010 - 2015.

Dalam Masterplan Pendidikan Kota Semarang disebutkan bahwa Semarang sebagai Kota Vokasi didukung oleh beberapa fakta yang sangat potensial bisa dikembangkan. Pertama, pada tahun 2012 Kota Semarang memiliki sebanyak 83 SMK, terdiri dari 11 SMK Negeri dengan jumlah peserta didik sebanyak 13.937 orang dan 73 SMK swasta dengan jumlah peserta didik sebanyak 22.067 orang. Kedua, potensi tenaga pendidikan (guru) SMK di Kota Semarang termasuk sangat baik, yaitu sebanyak 2.970 orang. Level pendidikan mereka adalah Doktor (S-3) : 1 orang; Magister (S-2): 140 orang dan Sarjana (S-1) : 2.613 orang. Adapun guru layak mengajar sebesar 92,73%, terdiri dari guru laki-laki (91,76%) dan guru perempuan (93,87%) dan hanya sebesar 7,27% tenaga pendidikan belum layak mengajar, yakni belum mencapai berpendidikan S-1 atau D-IV.

Ketiga, Pertumbuhan SMK yang semakin meningkat dibanding SMA. Pada tahun 2011 perbandingan jumlah SMA dengan SMK sebesar 51,73% : 48,27% dan pada tahun 2012

menjadi 46,58% : 53,42%. Keempat, pada tahun 2011, perbandingan jumlah siswa SMK dengan SMA di Kota Semarang sebesar 36,3% : 63,7% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 46,58% : 53,42%. Hal ini menunjukkan SMK semakin diminati. Kelima, tingkat penyerapan lulusan SMK di dunia usaha dan dunia industri pun mengalami kenaikan, yakni 67,76 % pada tahun 2011 menjadi sebesar 70,47% pada tahun 2011.

Lebih dari itu, terdapat program-program keahlian di SMK yang bersifat potensial dikembangkan melalui kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), antara lain: otomotif, permesinan, komputer, jasa, tata boga, tata busana, kerajinan tangan, robotik, audio-visual, broad cast, sistem informasi dan pemrograman komputer, dan furnitur. Dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Vokasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai upaya, meliputi peningkatan, percepatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan/laboran melalui pendidikan lanjut dan pelatihan (diklat) kompetensi. Selain itu, *Career Center*, *Business Center*, *Business Technology Center* dan *Teaching Factory* juga ditingkatkan dan ditambah di beberapa SMK.

Secara demografis, jumlah penduduk Kota Semarang rata-rata pertahun mengalami peningkatan 1,22%, sedangkan tingkat kemiskinan mengalami penurunan rata-rata pertahun 7,98%. Jumlah pengangguran di Kota Semarang rata-rata mengalami penurunan sebesar 6,89%, sedangkan jumlah wirausahawan rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 0,72% dan prosentase jumlah wirausahawan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan rata-rata 1,65% per tahun.

Tabel 2
Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan dan Wirausahawan
di Kota Semarang Tahun 2008-2013

Tahun	Jumlah penduduk	Wirausahawan	Pengangguran	Jumlah Kemiskinan	% wirausaha per Jumlah penduduk
2013	1,572,105	53,160	77,726	373,978	3.38
2012	1,559,198	52,723	217,123	-	3.38
2011	1,544,358	52,672	85,769	448,398	3.41
2010	1,553,778	52,095	87,583	-	3.35
2009	1,506,924	52,706	107,333	398,009	3.50
2008	1,481,640	51,304	-	491,747	3.46

Sumber: Semarang dalam Angka diolah

Dari table dapat disimpulkan, bahwa untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, perlu ditingkatkan jumlah usahawan-usahawan baru atau meningkatkan proporsi penduduk yang berwirausaha, karena meningkatnya jumlah wirausahaan berkorelasi dengan menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Untuk menjadi negara maju, sebuah negara paling tidak harus memiliki dua persen dari jumlah penduduk, Di Amerika, misalnya, terdapat sekitar 11 persen wirausahawan dari jumlah penduduk, Singapura sekitar 7 persen, dan di Indonesia baru sekitar 0,18 persen. Pola menciptakan lapangan kerja di dunia sudah berubah. Dulu pembukaan lapangan kerja menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekarang semua pihak baik pemerintah, pengusaha, dan lembaga pendidikan bertanggung jawab menciptakan lapangan kerja (Kompas 23 Desember , 2009).

Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi mengemban tugas tri darma yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Melalui tri darma tersebut, perguruan tinggi dituntut kontribusinya dalam pembangunan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, termasuk dalam hal ekonomi. Semakin besar kontribusi sebuah perguruan tinggi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi pula derajatnya di mata masyarakat.

Tugas tersebut semakin penting di tengah aruh kencedugan ekonomi regional dan global menuju pasar bebas (*free market*) dan persaingan bebas (*free competition*) dimana sumberdaya manusia (*human resources*) yang berkualitas merupakan sebuah keniscayaan. Tanpa SDM yang berkualitas, sangat berat bagi suatu bangsa untuk mampu bersaing di tengah kompetisi ekonomi global. Dengan SDM yang rendah kualitasnya, sebuah negara hanya akan menjadi pasar bagi produk negara maju. Mereka juga hanya akan menjadi penonton, bukan pemain, dalam hiruk pikuk lalu lintas ekonomi global.

Dalam konteks di atas, perguruan tinggi memiliki posisi strategis untuk menyiapkan dan menghasilkan SDM berkualitas yang siap berkompetisi. Melalui pintu pendidikan dan pengajaran yang merupakan salah satu dari tri darma, perguruan tinggi dapat merancang dan meramu kurikulumnya sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), sebuah sikap yang penting dalam kompetisi ekonomi. Melalui kurikulum yang tepat dengan strategi pengajaran yang tepat dan seimbang antara teori dan praktek serta pengayaan pengalaman lapangan yang memadai, perguruan tinggi akan mampu membentuk lulusan yang siap menciptakan

lapangan kerja baru dan bukan sebaliknya hanya menggantungkan pada lapangan kerja (sebagai pegawai negeri misalnya).

Perguruan Tinggi sepatutnya memainkan peran penting dalam menumbuhkembangkan semangat berwirausaha. Mengapa Pendidikan kewirausahaan mesti berjalan secara berkesinambungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pendidikan di perguruan tinggi? Jawabannya adalah untuk mengatasi pengangguran terdidik yang terus meningkat dengan menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja. Data statistik menunjukkan, 82,2 persen lulusan perguruan tinggi bekerja sebagai pegawai. Adapun masa tunggu lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan selama enam bulan hingga tiga tahun. Data ini tentu sangat menghawatirkan dari sudut pandang kemandirian. Melalui “kampanye” kewirausahaan di perguruan tinggi, pemerintah menarget pada 2015 sebanyak 20 persen lulusan perguruan tinggi berhasil menjadi usahawan. Penciptaan komunitas usahawan dari kalangan dosen dan lulusan perguruan tinggi tentu akan berimplikasi mempercepat penambahan jumlah usahawan Indonesia yang saat ini baru berjumlah 0,18 persen dari ideal 2 persen yang dibutuhkan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tentu upaya ini dapat diejawantahkan melalui tri darma perguruan tinggi pula. Pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Melalui tanggungjawab ini, perguruan tinggi dapat menyiapkan atau mencetak karakter mahasiswa yang berspirit kewirausahaan. Sebagai sebuah spirit, kewirausahaan bukan hanya monopoli jurusan yang terkait dengan “ekonomi” dalam arti praktis, tetapi absah dilakukan oleh seluruh mahasiswa dari segala jurusan atau program studi.

Dalam tri darma yang pertama ini, kurikulum memiliki peran yang esensial. Sebuah perguruan tinggi yang tidak memiliki orientasi pada semangat kewirausahaan, maka dapat dipastikan kurikulum yang dibangun akan menyulitkan mahasiswanya kelak dalam “persaingan pasar”. Karena spirit kewirausahaan sesungguhnya berpangkal dari keinginan untuk selalu berinovasi. Tanpa inovasi perguruan tinggi dipastikan akan sulit bersaing.

Itulah sebabnya, desain kurikulum yang inovatif—harap dicatat bahwa kurikulum dapat diubah kapanpun sesuai kebutuhan—saya kira patut menawarkan (1) perubahan cara pandang atau pola pikir mahasiswa agar selalu inovatif dan (2) memberikan bekal praktis bagi mahasiswa dalam kerangka kesiapan teknis menghadapi kebutuhan pasar. Perubahan *mindset* berarti mengubah kerangka pikir konvensional mahasiswa, seperti “setelah lulus harus menjadi PNS atau karyawan”, ke arah yang lebih progresif. Bahwa kesuksesan

memiliki definisi yang lebih luas daripada sekedar status profesi (yang oleh masyarakat dianggap “mapan”).

Bekal praktis dibangun melalui praktikum misalnya, yang memberikan pengalaman empiris terhadap mahasiswa dalam dunia kewirausahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak seperti industri, lembaga keuangan, dan pemerintah. Dalam pengalaman UNDIP, Unnes dan UIN Walisongo, sebenarnya kesempatan ini telah terbuka lebar setidaknya sejak status sebagai BLU (Badan Layanan Umum) diperoleh. Bahkan UNDIP telah menjadi PTN BH yang memiliki otonomi lebih luas. BLU memberikan kesempatan Perguruan Tinggi mengembangkan diri melalui kreasi wirausaha yang memungkinkan terciptanya inovasi-inovasi baru dalam industri sekaligus kesempatan menyejahterakan warga kampus dan sekitarnya.

Pembentukan-pembentukan unit usaha, seperti koperasi dan *business center*, juga dapat dijadikan wahana untuk mendekatkan diri bagi mahasiswa kepada spirit kewirausahaan dan praktik usaha secara langsung. Selain itu, “memperoleh keuntungan usaha” dari sebuah kampus bukan hal yang sama sekali baru atau katakanlah bertentangan dengan moralitas pendidikan. Sebagai contoh, pada 1915 tim *football* Universitas Yale pernah memberikan pendapatan terhadap kampus lebih dari 1 juta dolar (Nelson and Byers, 2015). Di masa kini, beberapa universitas di dunia memperoleh pendapatan yang sangat mencengangkan dari “aset” yang benar-benar mereka manfaatkan.

Tri darma yang kedua adalah penelitian. Dalam konteks ini riset menjadi penopang bagi kewirausahaan. Kepentingan riset dalam dunia kewirausahaan adalah membaca peluang dan tantangan secara detail. Hasil penelitian dapat mengukur misalnya, sebuah wilayah yang dianggap potensial, pemetaan produk, dan pengembangan usaha yang lain. Temuan riset ini sangat menguntungkan karena boleh jadi menekan biaya produksi dan menghasilkan keuntungan ekonomis dan sosial yang berlipat ganda. Itulah mengapa universitas tetap memiliki *bergaining position* di hadapan dunia industri karena penelitian menyediakan data-data yang valid dan terukur.

Tri darma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menjadi sentrum bagi pengembangan kewirausahaan. Selain dari sisi penyiapan sumber daya (dalam hal ini mahasiswanya), tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat, juga dalam hal kewirausahaan. Sesungguhnya, bagi PT yang telah memungkinkan, dapat mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja) yang memberikan kesempatan bagi siapapun, mahasiswa maupun masyarakat, memperoleh kesiapan teknis dalam dunia

kerja. Kampus, yang telah memiliki pusat bisnis, dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat. Ini adalah peran yang tidak dapat diabaikan.

Sebagaimana kewirausahaan melibatkan banyak entitas, perguruan tinggi juga tidak dapat melepaskan kerjasama dari berbagai pihak dalam upaya untuk mengembangkan spirit kewirausahaan ini. Kerjasama quartet, yakni antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha/industri dan universitas, perlu memainkan peran yang positif untuk bersinergi. Kerjasama keempatnya harus saling menguntungkan dengan motivasi pembangunan masyarakat.

Dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa konsep riil yang semoga dapat kita upayakan implementasinya di masa mendatang. Pertama, pendanaan mahasiswa melalui kontrak kuliah. Sebagaimana kita ketahui, banyak masyarakat kita yang kurang beruntung dari segi finansial tetapi mereka memiliki kecapakan intelektual yang bagus. Desainnya, kita menjaring calon mahasiswa dari kalangan lemah ekonomi itu untuk kemudian dikuliahkan melalui pendanaan tertentu, seperti dari lembaga keuangan dan dunia industri. Sebagai timbal balik, setelah mereka lulus kuliah dan bekerja, maka mereka mengangsur dana kuliah yang telah mereka gunakan. Konsep seperti ini merupakan konsep yang banyak ditemui di negara-negara jiran kita.

Kedua, penyediaan permodalan, skill, dan marketing. Universitas dalam hal ini bertindak sebagai perantara antara alumni dengan pihak lain untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Dunia usaha/industri memperoleh kolega atau tenaga yang *fresh* dan *qualified*, sedangkan mahasiswa menghilangkan sedikit tingkat kesusahan dalam mencari *network*. Hal lain juga bisa dilakukan dengan memberikan training kewirausahaan yang melibatkan para pengusaha sukses sehingga pembelajaran dan motivasi dapat ditangkap sekaligus.

Ketiga, pemagangan pada alumni yang telah menjadi wirausahawan. Sebagaimana saya singgung sejak awal bahwa kewirausahaan tidaklah monopoli alumni dari prodi tertentu, sehingga setiap perguruan tinggi dapat dipastikan memiliki alumni yang bergelut dalam jalur ini. Universitas dapat melakukan inventarisasi dan kemudian memagangkan para alumni ke tempat mereka. Hal ini tentu memiliki tiga keuntungan sekaligus, yaitu mengembangkan skill kewirausahaan melalui praktik, membangun *networking*, dan memperkuat jejaring alumni bagi universitas itu sendiri.

Hal yang tentu sangat menggembirakan ketika perguruan tinggi dapat menumbuhkan akar kewirausahaan sehingga bangsa kita dapat menjadi inovatif, kreatif dan produktif. Semoga Tuhan selalu menyertai niat baik kita. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Iis Prasetyo, 2009. “Membangun Karakter Wirausaha Melalui Pendidikan Berbasis Nilai dalam Program Pendidikan Non Formal” dalam <http://blog.uny.ac.id/iisprasetyo/2009/08/30/membangun-karakter-wirausaha-melalui-pendidikan-berbasis-nilai-dalam-program-pendidikan-non-formal/> diakses tanggal 11 Agustus 2014.

Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

Semarang dalam Angka Tahun 2014

Masterplan Pendidikan Kota Semarang

PP Nomer: 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomer 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*